



Angka Kemiskinan dan Pengangguran

• Sambungan Hal 9

"Selama pandemi Covid-19 ini kan target kinerja kami berubah. Karena kami tidak tahu Covid-19 ini seperti apa, maka kita buat tiga skenario, pesimis, moderat, optimis. Ada asumsi-asumsi yang mendasari untuk menentukan skenario itu. Kalau merencanakan kan kami rencanakan yang terburuk dulu," katanya, Minggu (28/6).

Ia mengungkapkan pihaknya menargetkan skenario pesimis tahun ini. Menurut dia, dampak Covid-19 memang sangat dahsyat. Kota Yogyakarta sangat tergantung pada sektor pariwisata, dengan adanya Covid-19, sektor pariwisata sangat menurun.

Meningkat

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan Kota Yogyakarta. Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2020 berdasarkan asumsi pesimis ditetapkan 13,97 persen, asumsi moderat ditetapkan 12,4 persen, dan asumsi optimis ditetapkan

10,6 persen.

Sementara untuk angka pengangguran di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 mengalami peningkatan, tahun sebelumnya sekitar 4,8 persen sedangkan tahun ini mencapai 10,46 persen untuk skenario pesimis.

"Kami mau menyamai tahun kemarin saja susah. Cara kami membuat asumsi itu begini, misalnya wisatawan, dulu kami kedatangan wisatawan luar negeri dan luar DIY berapa, tahun ini kami hanya kedatangan wisatawan DIY. Sektor pariwisata menjadi penopang yang paling besar," ungkapnya.

"Kalau lihat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sektor paling besar adalah akomodasi dan makan minum, di dalamnya adalah pelaku wisata. Sementara saat ini banyak karyawan PHK dan dirumahkan. Kondisi ini menyebabkan angka kemiskinan juga mengalami kenaikan, termasuk pengangguran, juga kesenjangan rasio gini," sambungnya.

Dengan demikian, Bappeda Kota Yogyakarta mengasumsikan pertumbuhan ekonomi minus sebesar 2,2 persen, asumsi moderat plus sebesar 0,35 persen, dan asumsi optimis plus

2,07 persen.

Meski demikian, Agus memastikan Pemkot Yogyakarta melakukan upaya maksimal agar asumsi pesimis tidak terjadi. Ia menargetkan tahun 2021 angka kemiskinan bisa menjadi 10,7 persen dan pada 2022 turun menjadi 7,1 persen. Hal itu termaktub dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta.

Wakil DPRD DIY Huda Tri Yudianta, sebelumnya menyebut potensi kenaikan angka kemiskinan di DIY sangat tinggi. Potensi kenaikan angka kemiskinan tersebut akibat lumpuhnya perekonomian di DIY.

Sehingga mengakibatkan banyak warga yang terganggu dengan penghasilan sehari-hari.

"Ini menjadi fokus pembangunan Pemda DIY yang harus dilakukan selanjutnya. Pengentasan kemiskinan di tengah pandemi Covid-19," katanya.

Ia menganggap, pembukaan lapangan kerja baru sangat dibutuhkan, supaya roda perekonomian masyarakat kembali bergerak. Di satu sisi, pihaknya juga dilema dengan kondisi industri dan juga pangsa pasar saat ini. (maw/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005